

Pemerintah Harus Lebih Friendly terhadap Investor

TAJUK

Dua lokasi yang akan dijadikan kawasan peruntukan industri (KPI) di Bantul hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena masih terkendala. Dua KPI tersebut adalah KPI Piyungan dan KPI Sedayu-Pajangan. Untuk KPI Sedayu-Pajangan seluas 270 hektare, sebenarnya dari segi aspek tata ruang dan peruntukan telah sesuai.

Namun, KPI yang ada di Kalurahan Argodadi, Sedayu dan Kalurahan Triwidadi, Pajangan tersebut terganjal status tanah. Sedangkan KPI Piyungan masalahnya dipandang jauh lebih kompleks karena butuh koordinasi intensif dengan Pemda DIY dan PT

Yogyakarta Isti Parama (YIP) selaku pengelola KPI Piyungan.

Permasalahan ini tentu saja membutuhkan penyelesaian secepatnya jika Pemkab Bantul ingin menarik investor masuk ke kawasan industri tersebut. Terlebih lagi jika menyangkut persoalan status tanah. Investor dipastikan tidak akan masuk kawasan industri jika tanah yang disediakan statusnya tidak jelas apalagi masih bermasalah.

Memang tidak mudah, namun berbagai persoalan khususnya yang menyangkut status tanah baik tanah milik pribadi, Sultan Grond, atau pun tanah kas desa harus diselesaikan secepatnya. Jika ini dibiarkan terus

berlarut-larut, upaya untuk mendatangkan investor ke kawasan industri tersebut hanya sebatas mimpi.

Persoalan ini harus menjadi pembelajaran bagi pemkab lain di DIY yang hendak membangun kawasan industri. Kejelasan status tanah menjadi hal yang utama karena investor tidak hanya berinvestasi dalam jangka lima tahun, sepuluh tahun atau pun 20 tahun. Bisa jadi mereka akan investasi jangka panjang, bahkan melakukan banyak pengembangan. Kedua, Pemda DIY maupun pemkab harus membuat regulasi yang memberi kemudahan kepada para investor. Berbagai kebijakan atau syarat-syarat lain yang

mempersulit investor harus dihilangkan.

Banyak kasus di mana investor memilih berinvestasi di luar DIY karena daerah tersebut lebih *welcome* dan memberikan berbagai fasilitas kemudahan. Bahkan, banyak investor kelas kakap yang memilih hengkang ke negara lain seperti Vietnam, Thailand dan lainnya karena investasi di Indonesia terkenal rumit dan berbelit-belit dan perizinan membutuhkan waktu yang lama.

Maka dari itu, Pemda DIY atau Pemkab Bantul harus segera membuat terobosan dalam menyelesaikan persoalan yang menghambat proyek KPI Piyungan dan KPI Sedayu-Pajangan. Langkah cepat

harus dilakukan karena Pemkab Bantul bakal bersaing dengan daerah lain dalam menggaet investor. Investor harus diperlakukan seperti tamu yang harus disambut dan dilayani dengan baik. Kita beri karpet merah kepada investor.

Dengan kata lain, Pemda DIY dan pemkab harus lebih *friendly* terhadap investor. Berbagai regulasi yang cenderung menghambat investor masuk harus direformasi. Sebab, investor tidak suka dengan hal-hal yang berbelit-belit dan bertele-tele.

Sekali ada masalah di daerah, investor dengan mudah lari ke daerah lain atau negara lain yang lebih ramah dalam berinvestasi. Kita jangan bermimpi bisa

mendatangkan banyak investor jika regulasinya masih njelimet dan berbelit-belit. Bantul atau Pemda DIY tak perlu tabu belajar ke daerah lain yang mampu menggaet investor dalam skala besar. Kalau perlu berguru ke Vietnam yang dalam lima tahun terakhir menjadi "surga" bagi para investor.

Sekali lagi, butuh keseriusan dalam mendatangkan investor. Ini bukan hanya sebatas semangat, melainkan *support* dari berbagai lini agar mereka nyaman berinvestasi. Jika ini bisa dilakukan, maka investasi akan membawa efek domino bagi peningkatan ekonomi daerah yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mudik 2024 dan Refleksi Masalah Kependudukan DIY



FX Danarto SY  
Pejabat Fungsional Pranata Humas  
Perwakilan BKKBN DIY

Pada periode Idulfitri 2024, Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah masyarakat yang melakukan mudik mencapai 193,6 juta jiwa, meningkat 13,7% dari tahun sebelumnya. Ini berarti hampir 70% penduduk melakukan mudik, karena menurut data kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia pada Desember 2023 mencapai 280,73 juta jiwa.

Dampak Lebaran terhadap perekonomian daerah serta aspek budaya terkait fenomena mudik sudah banyak diulas. Tulisan ini mengajak pembaca untuk merefleksikan hal lain yaitu permasalahan kependudukan. Pertanyaan yang selalu mengusik tiap menjumpai fenomena mudik dan arus balik adalah apakah para pemudik setelah puas mudik akan mengajak pendatang tambahan saat arus balik? Pertanyaan ini muncul karena mudik adalah pergerakan penduduk yang mampu mengubah demografi suatu wilayah.

Saat belajar di sekolah, diajarkan

bahwa pertambahan penduduk suatu wilayah terjadi karena adanya selisih antara jumlah kelahiran dengan jumlah kematian, serta antara jumlah migrasi masuk dengan migrasi keluar pada suatu periode waktu tertentu. Jika selisih tersebut positif maka jumlah penduduk bertambah, sedangkan bila sebaliknya maka jumlah penduduk menurun.

DIY telah menjadi daerah tujuan atau penerima migran. Pertumbuhan penduduk DIY lebih banyak disumbang oleh selisih positif migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar. Jogja telah sejak dahulu menjadi tujuan para pelajar dari berbagai daerah untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan tidak sedikit yang kemudian bekerja dan menetap. Jumlah kelahiran tidak menyumbang terhadap pertumbuhan penduduk DIY karena angka kelahiran yang rendah.

Pertumbuhan penduduk yang disumbang oleh migrasi masuk juga bisa ditunjukkan oleh indikator angka kelahiran atau TFR (*Total Fertility Rate*). Angka kelahiran atau TFR (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan perempuan) di DIY hanya 1,8 dan tidak mencapai 2. TFR DIY sebesar 1,8 berarti rata-rata perempuan yang tinggal di DIY selama usia produktifnya punya anak kurang dari dua.



Jika tidak ada faktor lain maka jumlah penduduk DIY akan menurun. Ini berarti jika tidak ada migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar maka pertumbuhan penduduk DIY akan minus atau semakin berkurang. Kenyataannya DIY mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun.

Fenomena angka kelahiran di bawah dua dialami negara-negara maju seperti Jepang, China dan negara-negara Eropa serta negara maju lainnya. Dampaknya pertumbuhan penduduk terancam minus bila tidak disokong oleh migrasi dari negara lain, umumnya dari negara-negara berkembang.

Baik sebagai migran tetap maupun sementara. Amerika dengan *Green Card*, Kanada, dan sejumlah negara maju bahkan mengundang profesional dengan *skill* dan keahlian untuk menetap di negara tersebut.

Refleksi Kebijakan

Muncul kekhawatiran sejumlah pakar kependudukan yang berharap DIY tidak lagi diberikan target penurunan TFR lebih rendah lagi jika hanya untuk mengkatrol penurunan TFR secara nasional. Perlu diperhatikan bahwa disparitas TFR antarprovinsi cukup besar karena ada provinsi lain, NTT misalnya, memiliki TFR 2,7. Jika diturunkan sampai tingkat

kabupaten tentu angkanya akan ada yang lebih besar lagi. Salah satu pakar yang memprihatinkan hal ini adalah pakar UGM Prof Sukamdi yang mencemaskan angka TFR DIY bisa turun sampai 1,6 bila kecenderungan yang terjadi dibiarkan saja oleh pemerintah.

Berkaca dari pengalaman negara-negara maju tersebut, apakah untuk DIY perlu cara pandang dan kebijakan promosi pengendalian pertumbuhan penduduk dengan pemakaian kontrasepsi? Memang secara nasional TFR Indonesia masih berkisar 2,2 dan DIY merupakan penyumbang menuju TFR ideal nasional sebesar 2,1. Namun ketika TFR DIY sudah jauh di bawah TFR ideal, mulai muncul kekhawatiran DIY akan mengalami pertumbuhan penduduk minus yang tentunya tidak dikehendaki.

Promosi penggunaan alat kontrasepsi tetap perlu didorong walau angka kelahiran DIY sudah termasuk yang terendah bersama DKI dan Bali. Alasannya adalah karena penggunaan kontrasepsi merupakan cara untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Kontrasepsi dapat mencegah wanita dengan usia rawan agar tidak hamil yang akan berdampak buruk pada kesehatan dan keselamatan ibu serta anak, juga mencegah ibu dengan balita agar tidak kembali hamil saat masih harus

merawat bayi secara intensif. Jadi walau TFR sudah rendah, promosi alat kontrasepsi harus tetap digencarkan demi menekan angka kematian ibu dan anak.

Untuk bahan refleksi selanjutnya, sebuah penelitian oleh Muhammad Arif Fahrudin Alfana dkk yang dipublikasikan di *NATAPRAJA*, Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara pada 2015 menunjukkan hasil yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan di Sleman itu antara lain mengungkap bahwa kaum migran yang masuk ke Sleman cenderung memiliki TFR yang lebih tinggi dari penduduk nonmigran atau penduduk "asli".

Dengan kata lain pendatang di Sleman memiliki jumlah anak riil (maupun jumlah ideal yang diinginkan) rata-rata lebih banyak dari penduduk setempat. Bagi DIY sebagai daerah istimewa berdasarkan kebudayaan, maka fenomena migran yang cenderung mempunyai anak lebih banyak dibanding penduduk "asli" menarik untuk diteliti lebih lanjut. Apakah setelah hampir 10 tahun kecenderungan itu masih ada atau jangan-jangan justru makin membesar, serta apakah memengaruhi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis budaya ini.

Sebagai daerah yang harus mempertahankan keistimewaan budayanya, Pemerintah DIY tentu tidak ingin sampai harus meniru Jepang memprovokasi warganya untuk menikah dan punya anak. Atau seperti Amerika, berusaha menarik pendatang dari provinsi lain untuk menetap. Atau memang sudah harus begitu?



Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Anton Wahyu Prihartono.  
Wakil Pemimpin Redaksi: Nugroho Nurcahyo.  
General Manajer Konten: Budi Cahyana.  
Dewan Redaksi: Ahmad Djauhar, Arief Budisusilo, Y. Bayu Widagdo, Suwarmin, Rini Yustiniingsih.  
Manajer Sekretariat Redaksi & Promosi: Putri Meridhita.  
Manajer Konten Senior: Laila Rochmatin, Maya Herawati, Sugeng Pranyoto  
Manajer Konten: Arief Junianto, Bhekti Suryani, Galih Eko Kurniawan, Mediani Dyah Natalia, Yudhi Kusdiyanto.  
Reporter: Abdul Hamid Razak, Alf Anissa Karin, Andreas Yuda Pramono, Anisatul Umah, Bernadetha Dian Saraswati, Catur Dwi Janati, David Kurniawan, Jumali, Lajeng Padmaratri, Lugas Subarkah, Nina Atmasari, Sirojul Khafid, Sunartono, Stefani Yulindriani Ria S. R, Triyo Handoko, Ujang Hasanudin, Yosef Leon Pinsker.  
Fotografer: Desi Suryanto (koordinator), Gigih Mulystyo Hanafi.  
Asisten Manajer Kreatif & Desain: Muhammad Nurbawa Purna Yudha.

Harian Jogja BERBUDAYA. MENGINSPIRASI. TERPERCAYA.

Penerbit PT Aksara Dinamika Jogja | Sertifikat Dewan Pers No: 205/DP-Terverifikasi/K/11/2018

Presiden Direktur: Arief Budisusilo.  
Direktur Bisnis: Anton Wahyu Prihartono.  
Direktur Keuangan dan Administrasi: Anissa Nurul Aini.  
General Manajer IMS: Sri Pujiningsih.  
Manajer Event: Eko Soetarmo  
Manajer Sirkulasi & Pengembangan Bisnis: Wisnu Wardana.

Alamat Redaksi/Perusahaan: Jl. A.M. Sangaji 41 Jogja-Telp: 0274-583183 (Hunting)-Faks: 0274-564440. Iklan@harianjogja.com & Sirkulasi@harianjogja.com-Rekening Bank: PT Aksara Dinamika Jogja, Bank Mandiri cab. Katamso 137-000.583966-3-Tarif Iklan: Display BW 20.500/mmk1, FC 33.000/mmk1, kolom 11.500/mmk1, baris 7.000/baris, dukacita BW 10.000/mmk1, FC 13.000/mmk1, hal 1 FC bawah lipatan Rp 80.000/mmk1, Atas lipatan Rp 85.000/mmk1, creative ad BW Rp 26.500/mmk1, FC 42.000/mmk1-Perencanaan: PT Solo Grafika Utama. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Harian Jogja dilengkapi identitas dan tidak diperbolehkan menerima pemberian dalam bentuk apapun.

Redaksi menerima artikel dari penulis. Artikel diketik dengan spasi ganda maksimal 6.000 karakter disertai riwayat hidup singkat penulis, foto diri penulis, nomor rekening bank, dan NPWP (jika ada). Kirimkan melalui email ke alamat *aspirasi@harianjogja.com*. Artikel harus orisinal dan tidak dikirimkan ke media massa lain. Setiap artikel yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis, mencerminkan publik, dan tidak mempertentangkan SARA. Artikel yang dimuat menjadi hak redaksi Harian Jogja dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam grup *Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI)*. Apabila lebih dari dua pekan tulisan tak dimuat, penulis berhak mengirimkan ke media lain. Sekretariat redaksi tidak melayani pembayaran honor secara langsung. Honor penulis akan dikirim melalui transfer bank.